

# BAB 1 PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Permasalahan

Demokrasi adalah suatu istilah yang diambil dari bahasa Yunani, yaitu berasal dari kata *demos* (rakyat) dan *kratein* (memerintah). Demokrasi atau pemerintahan oleh rakyat, dipercaya sebagai gagasan universal yang sangat diagungkan dalam sejarah pemikiran manusia. Demokrasi dewasa ini dinyatakan sebagai buah pemikiran yang paling wajar dan baik untuk menjalankan semua sistem organisasi politik dan sosial. Demokrasi telah menjadi obsesi sejumlah masyarakat non-Barat semenjak awal abad XX. Kaum elit akademisi negara-negara bekas jajahan Barat dengan berbekal pendidikan yang memadahi mengembangkan nilai-nilai demokrasi yang akan digunakan untuk membebaskan dari belenggu penjajahan. Di zaman Hindia Belanda, gerakan seperti ini dinamakan Kebangkitan Nasional.

Perjalanan demokrasi di Indonesia berubah-ubah menurut rezim pemerintahan presidennya. Di zaman Orde Lama atau pemerintahan Soekarno selaku presiden RI yang pertama, di mana Indonesia baru-baru saja merasakan nikmatnya kemerdekaan, dibuatlah sebuah bentuk pemerintahan yang disebut dengan model Demokrasi Terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah suatu bentuk demokrasi yang seluruh kebijakan-kebijakannya diatur oleh pusat pemerintahan, yakni presiden Soekarno sendiri. Dalam hal berdemokrasi, Soekarno membuat semacam paham kesatuan dari pluralisme masyarakat yang disebut dengan Nasakom, singkatan dari Nasionalis, Agama, dan Komunis. Namun dalam kenyataannya aplikasi dari Nasakom ini tidak bisa membuat bangsa Indonesia menjadi bersatu. Sebaliknya ia justru semakin menampakkan *difference* antara kelompok satu dengan yang lain. Terlebih lagi dengan diberlakukannya sistem Demokrasi Terpimpin yang diterapkan oleh Soekarno, kehidupan sosial-politik rakyat Indonesia justru dibuat menjadi tidak bebas. Kebijakan-kebijakan Soekarno terlalu otoriter.

Di zaman Orde Baru yaitu pemerintahan Presiden Soeharto, model demokrasi yang dijalankan adalah model Demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila sesungguhnya bukanlah sebuah bentuk pemerintahan yang demokratis.

Demokrasi Pancasila hanya sebuah paham yang multitafsir yang ujung-ujungnya hanya mementingkan golongan tertentu, yaitu: keluarga, kerabat, dan kroni-kroni Soeharto dalam memantapkan kekuasaan di pemerintahan RI. Pada masa itu kehidupan sosial-politik di Indonesia juga dijalankan dalam ranah otoriter dan militeristik ‘tangan besi’ yang membelenggu kebebasan berekspresi warganegaranya. Kehidupan berdemokrasi di Indonesia tidak berjalan dengan baik. Terbukti dengan lamanya presiden Soeharto berkuasa di Indonesia, yakni selama 32 tahun. Dalam waktu 32 tahun itu pulalah seluruh aset-aset negara yang berharga dikorupsi dan dijual kepada pihak asing oleh Soeharto.

Pada masa pemerintahan Presiden Habibie di Indonesia selaku pemimpin RI yang ke-3, Indonesia tengah meniti jalan menuju demokrasi. Beberapa kemajuan penting dalam berdemokrasi yang dilakukan pemerintahan Habibie antara lain; adanya kebebasan pers, pembebasan para tahanan politik (tapol), kebebasan bagi pendirian partai-partai politik, kebijakan desentralisasi (otonomi daerah), amandemen konstitusi antara lain berupa pembatasan masa jabatan presiden maksimal dua periode, pencabutan beberapa UU politik yang represif dan tidak demokratis, dan netralitas birokrasi serta militer dari politik praktis. Pemerintahan Habibie cukup berhasil ‘mengawinkan’ antara proses demokratisasi dan kebijakan luar negeri dari sebuah pemerintahan di masa transisi. Namun, di dalam kebijakan demokratisnya, pemerintahan Habibie memberi pelajaran penting bahwa kebijakan luar negeri yang terlalu luas juga dapat memberi dampak negatif bagi kelangsungan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam menangani persoalan disintegrasi Timor Timur. Indonesia memberi *options* referendum untuk mencapai solusi akhir atas rakyat Timor Timur yang diakhiri dengan melepasnya propinsi Timor Timur dari NKRI. Ini adalah salah satu kerugian terbesar bangsa Indonesia dalam sejarah.

Ketika Abdurrahman Wahid, atau Gus Dur terpilih menjadi presiden ke-4 RI, ia dianggap mewakili dua kemenangan sekaligus, yaitu kemenangan demokrasi dan Islam. Dilihat dari sudut pandang demokrasi politik, Gus Dur merupakan satu-satunya presiden yang terpilih secara demokratis sepanjang politik Indonesia. Ia dipilih oleh MPR berdasarkan hasil Pemilu 1999, yang dinilai paling jujur, adil, dan demokratis. Kompetisi politik dalam proses pemilihan

presiden berlangsung sangat bebas, terbuka, dan adil. Tidak ada rekayasa politik, intimidasi, ataupun represi. Namun, pemerintahan Gus Dur mengalami krisis akibat konflik antara elit politik yang tak berkesudahan. Konflik itu justru bermula dari sikap kebijakan politik Gus Dur dengan membuat serangkaian kontroversi yang kurang populer, merusak koalisi dan hubungan baik dengan parlemen, serta memerintah semaunya sendiri.

Presiden selanjutnya adalah Megawati Soekarnoputri selaku presiden RI ke-5. Ia adalah putri dari presiden RI yang pertama yaitu Soekarno. Popularitas Megawati yang bisa mengantarkan dirinya untuk menjabat sebagai presiden memang sangat terbantu oleh figur ayahnya tersebut. Ia sewaktu menjadi presiden lebih banyak diam dan tak banyak berkomentar. Inilah salah satu faktor yang membuat popularitas Megawati merosot, yaitu kegagalan komunikasi politik. Publik tidak mendapatkan penjelasan yang memuaskan atas apa yang tengah terjadi dan mengapa pemerintah mengambil kebijakan tertentu. Akibatnya publik mengembangkan opininya sendiri. Di masa pemerintahan Megawati, Indonesia mengalami suatu kerugian perekonomian yang besar. Ada sejumlah *deal* korupsi yang muncul, antara lain: Kontrak penjualan gas dari Lapangan Tangguh di Papua kepada Cina dengan harga yang sangat murah (US\$ 2,4 per mmBtu dengan kontrak selama 25 tahun), serta penjualan sejumlah perbankan nasional ke pihak asing. Selain itu, banyak korupsi yang telah dilakukan oleh kader-kader PDIP di lembaga MPR/DPR.

Pemimpin Indonesia yang terakhir adalah Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY selaku presiden RI yang ke-6. Di masa pemerintahan SBY, Indonesia sudah mulai belajar berdemokrasi dengan baik. Pihak asing menilai bahwa Indonesia pantas dijadikan *role model* (panutan) atas sistem demokrasi modern di Asia. Terbukti bahwa *International Association of Political Consultants* atau IAPC memutuskan memberikan *The Democracy Medal Award* kepada bangsa Indonesia atas prestasinya menerapkan nilai demokrasi dalam beberapa tahun terakhir ini. Presiden SBY mewakili bangsa Indonesia menerima penghargaan itu. Prestasi paling menonjol adalah keberhasilan bangsa Indonesia menyelenggarakan Pemilu 2004 secara demokratis, aman, damai, dan tanpa konflik.

Di balik keberhasilan bangsa Indonesia dalam berdemokrasi, pada masa pemerintahan SBY rakyat harus menghadapi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sebesar 125%. Langkah pemerintah untuk menaikkan harga BBM rata-rata 125 persen hanya mempertimbangkan aspek ekonominya saja, tidak mempertimbangkan imbas lanjutan yang ditimbulkan dari kenaikan harga BBM tersebut. Keputusan pemerintah menaikkan harga BBM hingga rata-rata melebihi 100 persen sebagai kebijakan yang terlalu berani. Presiden SBY memberikan suatu solusi atas naiknya harga BBM kepada para kaum miskin. Solusi itu dinamakan dengan Bantuan Langsung Tunai atau BLT, berupa uang tunai sebesar Rp 200.000,- yang diberikan kepada rakyat miskin setiap bulannya. Hal ini-pun ditengarai tak terlalu banyak membantu kaum miskin.

BBM adalah satu-satunya sumber energi yang hingga saat ini masih memegang peranan penting di dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Segala aktifitas perekonomian dan pendistribusian tentunya menggunakan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor membutuhkan BBM untuk beroperasi. Dengan semakin mahalnya BBM tentu akan semakin mahal juga ongkos pengiriman barang dan jasa. Dampak yang ditimbulkannya bisa mengancam stabilitas ekonomi yang saat ini mulai dibangun.

Inilah suatu kenyataan yang buruk dari aplikasi sebuah gagasan yang dianggap baik dewasa ini. Sejarah bangsa Indonesia menunjukkan bahwa gagasan demokrasi yang tidak diterapkan dengan baik akan sia-sia. Republik Indonesia sebagai negara yang sudah dianggap memiliki sistem demokrasi yang baik ternyata belum bisa menjamin kehidupan demokrasi yang baik pula. Diterimanya gagasan demokrasi di Indonesia masih belum bisa memberikan kemaslahatan terhadap rakyatnya. Sebuah gagasan yang baik tanpa penerapan yang benar tidak akan memberi manfaat yang berarti. Kehidupan demokrasi di Indonesia masih belum bisa melepaskan rakyat dari penderitaan.

Pengaruh besar dari demokrasi ini telah mendorong penulis untuk melakukan penelitian atau telaah atas demokrasi di Indonesia secara filosofis. Penulis memilih zaman pemerintahan SBY sebagai kajian ilmiahnya karena pada zaman pemerintahan SBY ini terjadi suatu peristiwa besar bahwa bangsa Indonesia sudah dianggap sebagai contoh panutan sistem demokrasi terkini,

namun jumlah kemiskinan justru bertambah banyak. Karya ilmiah ini bermaksud membuat suatu analisa kritis-filosofis, khususnya dalam perspektif filsafat manusia, tentang kehidupan demokrasi di Indonesia sebagai gagasan moral sosial-politik.

Topik yang diangkat oleh penulis ini belum pernah dimuat dan/atau berbeda dibandingkan tulisan-tulisan apapun dan di manapun. Ini terbukti dari observasi yang dilakukan oleh penulis ke beberapa perpustakaan, buku-buku, karya-karya ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, maupun artikel-artikel dari internet. Bilamana terdapat persamaan *issue* yang diangkat antara penulis dengan karya-karya ilmiah lain, maka itu hanya faktor ketidaksengajaan. Isi dan pendekatan yang dilakukan oleh penulis tetap berbeda.

## 1.2 Perumusan Masalah

Dalam penelitian filosofis ini, objek yang akan diteliti adalah nilai-nilai esensial dari demokrasi yang berkenaan dengan realitas sosial-politik melalui filsafat manusia. Permasalahan dalam aspek ontologis yang ingin diangkat oleh penulis adalah realitas konkret adanya rakyat miskin di Indonesia. Rakyat miskin di Indonesia adalah sekelompok masyarakat yang bertempat tinggal di Indonesia dan tidak memiliki *property* apapun, baik benda maupun kecakapan yang dapat dijadikan *commodity* sebagai jaminan kualitas hidup mereka. Jumlah penduduk Indonesia saat ini diperkirakan lebih dari 240 juta jiwa. Jumlah manusia sebanyak itu akan berakibat buruk apabila penduduknya banyak yang berada di bawah garis kemiskinan. Menkominfo berpendapat, “Jika penduduk Indonesia sekitar 240 juta, jumlah penduduk miskin turun dari sekitar 38,4 juta jiwa (16 persen) pada tahun 2007 menjadi 36 juta (15 persen) pada tahun ini”. (Menkominfo: Bukan Kemiskinan, Lemah, Kepercayaan Masyarakat pada Lembaga Zakat, *Kompas*, Kamis, 18 September 2008).

Lebih dari 15% atau sekitar 36 juta dari total penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan. Dengan banyaknya penduduk Indonesia yang miskin dan tidak sejahtera, maka akan semakin banyak pula masalah-masalah sosial-politik yang ditimbulkan. Hal inilah yang menjadi permasalahan ontologis di dalam penelitian ini.

Permasalahan dalam aspek epistemologis yang ingin diangkat oleh penulis adalah landasan *scientific* berupa kekuasaan, ketergantungan, dan kemiskinan. Kekuasaan adalah suatu kemampuan persuasif dari seseorang atau sekelompok orang dalam rangka mengatur lingkungannya dan perilaku orang lain demi tujuannya. Kekuasaan tidak selalu identik dengan *coercion*, tetapi lebih kepada ‘pengaruh’ atau *influence*. Sebuah kekuasaan yang dibarengi dengan otoritas akan memiliki legitimasi kewenangan terhadap struktur sosial-politik atas berlangsungnya kekuasaan tersebut. Kekuasaan berpengaruh pada seluruh struktur tindakan yang menekan dan mendorong tindakan-tindakan lain melalui rangsangan, persuasi, atau melalui paksaan dan larangan (Haryatmoko, 2003: 242). Kekuasaan bekerja secara relasional dan timbal-balik antara orang atau organisasi yang berkuasa dengan unit-unit yang dikuasai. Penguasa membutuhkan bawahan untuk mengutarakan maksud dan keinginannya, sementara bawahan membutuhkan imbalan dan pendapatan dari penguasa atas pekerjaannya. Hal ini dapat menimbulkan suatu hubungan kepada kedua belah pihak.

Ketergantungan adalah suatu kondisi pada subjek yang mengandalkan orang lain yang dianggap lebih daripada dirinya, sebagai tempat diserahkannya nasib subjek tersebut. Ketergantungan adalah seseorang yang menyandarkan atau mempercayakan orang lain sebagai sumber pendapatan yang utama. Hal ini berkaitan dengan pemikiran tentang moralitas budak dan tuan dalam pemikiran ‘kehendak untuk berkuasa’ oleh Nietzsche. Manusia yang hidup menurut moralitas tuan adalah orang yang memberanikan diri untuk mewujudkan daya-daya hidupnya. Ia tidak perlu menggantungkan hidupnya di tangan orang lain karena hanya dialah yang bertanggungjawab atas dirinya. Sebaliknya, manusia yang hidup menurut moralitas budak adalah orang yang tidak mampu melampiaskan daya-daya hidupnya, tetapi menaruh hidupnya pada moralitas tuan. Bagi moralitas budak, keutamaan-keutamaan seperti kasih sayang, keramah-tamahan, dan kerendahan hati dijunjung tinggi; sedangkan individu yang kuat, mandiri, dan otonom dianggap tidak baik.

Kemiskinan adalah suatu keadaan buruknya kualitas hidup karena kurangnya pemenuhan terhadap kebutuhan-kebutuhan dasar, seperti: papan, pangan, sandang, dan air bersih. Kemiskinan akan berakibat pada kurangnya

*access* pada pendidikan dan pekerjaan (yang justru dapat membuat seseorang terlepas dari kemiskinannya dan mendapat kehormatan sebagai warganegara). Orang yang miskin adalah orang yang tidak berkemampuan dalam mendapatkan barang, jasa, atau kesenangan hidup, yang mana orang lain bisa mendapatkannya secara cuma-cuma. Orang yang hidup di bawah garis kemiskinan mengalami kekurangan *access* terhadap kesehatan, makanan, bahkan tak jarang yang mengalami gangguan mental dan fisik yang membuatnya semakin sulit untuk meningkatkan taraf hidup. Kemiskinan adalah cerminan dari baik/tidaknya politik dalam sebuah negara. Ada sebuah ungkapan dari Melissus yang berkata “Kemiskinan merupakan fondasi. Baiknya politik adalah ada orang yang mengatur dan ada orang yang diatur. Setiap orang yang diatur tidak akan menurut kalau bukan karena sangat miskin dan butuh.” (Kartanegara, 2005: 179).

Hal ini berarti pada dasarnya tidak ada manusia yang mau diatur-atur oleh pihak lain, namun ketidakberdayaan karena kemiskinan-lah yang membuat orang menjadi ‘bagaikan kerbau yang dicucuk hidungnya’. Kemiskinan telah membuat manusia mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup, sehingga ia rela menuruti perintah apapun demi mencukupi kebutuhan hidupnya.

Aspek kekuasaan, ketergantungan, dan kemiskinan memiliki hubungan yang saling berkaitan antara satu dengan lainnya. Kekuasaan memiliki dimensi yang universal, seperti kecenderungannya untuk sewenang-wenang jika tidak di-*control*. Semakin besarnya kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang atau suatu organisasi maka akan semakin besar pula *influence*-nya terhadap lingkungan dan orang lain. Jika hal ini terjadi maka rakyat secara keseluruhan dirugikan karena sumber daya publik disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Akibatnya, penguasa memiliki kelimpahan sumber daya yang terkonsentrasi hanya pada diri dan kalangannya saja, sementara rakyat kehilangan sarana dan faktor-faktor produksi yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka. Penguasa membutuhkan rakyat untuk meluaskan kekuasaannya, sebaliknya rakyat lebih membutuhkan penguasa untuk mempertahankan kehidupannya. Hal ini menyebabkan rakyat menjadi memiliki rasa ketergantungan besar kepada penguasa akibat terkurasnya sumber daya publik. Penguasa akan semakin sewenang-wenang di dalam menjalankan kebijakannya terhadap masyarakat

karena ia menyadari bahwa ketergantungan rakyat sangat besar terhadap dirinya. Alhasil, penguasa akan semakin kaya dan mantap kekuasaannya sementara rakyat menjadi semakin miskin dan menderita. Kemiskinan yang terjadi pada rakyat ‘dipertahankan’ dalam sebuah sistem oleh penguasa agar selalu terjadi hubungan ketergantungan antara orang miskin dengan penguasa. Hubungan ketergantungan di sini tidak lain hanyalah untuk memperluas kekuasaan.

Permasalahan dalam aspek aksiologis yang ingin diangkat oleh penulis adalah tentang nilai kemandirian. Kemandirian adalah kemampuan seseorang untuk mengatur atau mengelola urusan-urusan, membuat keputusan, dan memenuhi keinginannya sendiri secara otonom. Hal ini berkaitan dengan konsep *Übermensch* atau Manusia Unggul dalam pemikiran Nietzsche. *Übermensch*, melalui ‘kehendaknya untuk berkuasa’, bagi Nietzsche adalah kehendak untuk hidup dan keadaan pengada lebih tinggi serta lebih berkuasa. Dari evaluasi ulang semua makhluk hidup, akan muncul ‘manusia mulia’, manusia yang kuat, keras, dan kalau perlu kejam (Osborne, 2001: 128). Menurutnya, sebagaimana moralitas tidak terletak pada kebaikan, demikian juga tujuan dari kerja keras manusia bukanlah demi peningkatan kualitas hidup manusia, melainkan demi perkembangan individu-individu unggul yang lebih baik dan lebih kuat (Abidin, 2003: 100). Manusia harus mendefinisikan nilai-nilai kehidupannya sendiri tanpa perlu memikirkan perasaan orang lain. Sebagai seorang individu, kita harus hidup untuk maksud dan tujuan sendiri. Kita harus menghindari anggapan dari orang lain atau hidup demi kepentingan orang lain (Stevenson, 2005: 206).

Nilai kemandirian dalam konsep *Übermensch* mengindikasikan bahwa segala usaha dan kemajuan yang dilakukan oleh seseorang tentunya hanya akan memberikan manfaat kepada kehidupannya sendiri dan demi kelangsungan kekuasaan orang itu juga. Kemandirian seseorang tidak untuk memajukan orang lain. Kemandirian seseorang haruslah ditujukan untuk menjadi *Übermensch* yang justru memiliki kehendak untuk berkuasa atas segala-galanya.

### 1.3 Pertanyaan Penelitian

Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang jalannya penelitian filsafat ini perlu kiranya dirumuskan masalah yang akan menjadi *central* kajian

dari penelitian ini. Melalui observasi terhadap fakta-fakta empiris, penulis menemui bahwa rakyat Indonesia yang berada di bawah garis kemiskinan adalah sekelompok manusia Indonesia yang tidak memiliki kecakapan dalam hidup, tidak mandiri, dan sering dijadikan objek kekuasaan dari para petinggi negara. Mereka rela untuk dibujuk dan digiring untuk melanggengkan kekuasaan dari para penguasa hanya demi 'sesuap nasi'. Pokok penelitian yang ingin diangkat oleh penulis yaitu permasalahan tentang praktik kehidupan demokrasi yang diarahkan pada perilaku manusia baik sebagai pemimpin maupun sebagai warga masyarakat yang ditinjau dari aspek Aristokrasi Übermensch. Atas dasar itulah maka muncul pertanyaan penelitian sebagai berikut:

- (a). Sebagai negara yang memakai konsep demokrasi sebagai sistem sosial-politiknya, mengapa cita-cita bangsa Indonesia untuk mencapai kehidupan masyarakat yang demokratis masih belum terwujud?
- (b). Berdasarkan pertanyaan di atas, apakah konsep Aristokrasi Übermensch dapat memunculkan sikap-sikap mental yang dapat memperbaiki kehidupan berdemokrasi di Indonesia?

Hal-hal inilah yang menjadi pokok telaah dalam penelitian ini. Jawaban akan diketengahkan secara runut dan pada akhirnya berupaya untuk memberikan jawaban filosofis bagi permasalahan demokrasi di Indonesia tersebut.

#### **1.4 Metode Penelitian**

Penelitian ini akan diselenggarakan dengan menggunakan metode-metode antara lain:

- (a). Kajian literatur. Masalah realitas kehidupan demokrasi di Indonesia akan dievaluasi dengan menggunakan perangkat Aristokrasi Übermensch dari Friederich Nietzsche. Beberapa literatur utamanya adalah: *Basic Writings of Nietzsche*, dari Friedrich Nietzsche; *Demokrasi Indonesia: Visi & Praktek* dari Denny J.A; dan *Esai Filsafat Untuk Masa Kini: Telaah Masalah Roh-Materi Berdasarkan Data Empiris Baru* dari Louis Leahy. Selain itu penelitian ini juga menggunakan literatur-literatur lainnya sebagai sumber-sumber penunjang.

- (b). Kritis reflektif
- (c). Fenomenologi, yaitu sebuah pendekatan filsafat yang berpusat pada analisa terhadap gejala-gejala yang menampakkan diri dalam kesadaran manusia sembari menemukan *eidos* dari setiap fenomena.
- (d). Interpretasi, yaitu suatu cara untuk menafsirkan atau menerjemahkan teks untuk mendapatkan suatu pemahaman. Di sini penulis berusaha untuk menemukan makna-makna filosofis yang terkandung di dalam teks-teks filsafat untuk kemudian dimaknai dan dipahami.

Pada perkembangannya, penelitian ini akan menggunakan kasus-kasus nyata sebagai bahan uji terhadap *issue* kemiskinan di Indonesia. Selain itu akan digunakan pula beberapa *thought experiment* sebagai sarana penguji logika pikiran-pikiran yang diangkat dalam penelitian ini.

### **1.5 Kerangka Teori dan Konsep**

Penelitian ini akan menggunakan beberapa teori, antara lain: (a). Teori Aristokrasi *Übermensch*, (b). Teori Transvaluasi, (c). Teori Demokrasi Pancasila Reformasi, (d). Teori budaya liberal, (e). Teori filsafat manusia tentang masalah Roh-Materi/Jiwa-Badan, dan (f). Teori Sistem yang bersifat *Backward-looking*. Teori-teori ini akan dikembangkan oleh penulis agar dapat memenuhi kebutuhannya sebagai teori yang akan mengkritisi realitas kehidupan demokrasi di Indonesia.

#### **(a). Teori Aristokrasi *Übermensch***

Aristokrasi berasal dari istilah bahasa Yunani yaitu kata *aristos* (terbaik) dan *kratein* (menjadi kuat, memerintah). Aristokrasi adalah suatu struktur kemasyarakatan atau pemerintahan yang dijalankan oleh orang-orang pilihan (*aristokrat*) yang dipilih berdasarkan kriteria seperti: kepandaian, kebajikan, golongan, status, kekuasaan, prestasi, nasib baik, atau kombinasi-kombinasi dari hal-hal ini. Aristokrasi dianggap sebagai salah satu konsep pengaturan sosial-politik yang ideal, karena aristokrasi berarti pemerintahan oleh orang yang terbaik demi kepentingan seluruh masyarakat, tetapi tanpa partisipasi rakyat.

Übermensch adalah simbol dari individu yang paling digdaya, paling tinggi derajatnya sehingga tidak ada lagi nilai yang lebih tinggi darinya. Übermensch adalah manusia yang menciptakan nilai-nilai moralnya sendiri. Übermensch adalah manusia yang mengetahui bahwa tidak ada satu-pun yang melebihi atau mengatasi dunia ini. Übermensch mengakui dunia ini seratus persen sebagai miliknya sendiri. Ia menerima secara konsekuen dan menyeluruh bahwa ia sendiri merupakan 'kehendak untuk berkuasa'. Übermensch adalah tujuan dan hanya manusia yang merupakan jembatan ke arah tujuan itu.

Aristokrasi Übermensch adalah konsep kekuasaan ideal yang dipegang oleh segelintir orang yang unggul dan memiliki kemampuan di atas rata-rata orang kebanyakan. Nietzsche berkata bahwa keutamaan sejati hanya bagi minoritas aristokratik (Osborne, 2001: 128). Ia bertahan pada pendirian bahwa masa depan berada di tangan orang-orang besar. Menurut Nietzsche, tujuan kebudayaan sesungguhnya adalah menghasilkan jenius-jenius yang akan memberi makna pada kehidupan ini. Kebudayaan yang menganjurkan sikap *durchschnittlich* (tengah-tengah atau rata-rata) hanya akan membasmi bakat-bakat dan menotalisir para individu menjadi kerumunan massa. Namun, ia berpendapat bahwa massa yang bersikap seperti ini merupakan sarana untuk mencapai sebuah tujuan, yaitu berkembangnya jenis manusia yang lebih luhur. Aristokrasi Übermensch merupakan konsep sosial-politik yang mengatur pemerintahan dan/atau kehidupan bermasyarakat yang dikuasai oleh seseorang yang memiliki visi dan misi ke depan serta keinginan kuat untuk berkuasa. Kehendak untuk berkuasa ini didapat setelah melakukan transvaluasi, berupa pergantian simpati, cinta, dan belas kasih kepada egoisme, penghinaan, dan pengucilan diri. Transvaluasi ini hanya menuntut manusia yang memiliki jiwa yang bebas. Jiwa bebas menafikan pengutamaan nilai *altruism*, karena hal ini merupakan bentuk perbudakan.

### **(b).Teori Transvaluasi**

Kata Transvaluasi adalah sebuah istilah dalam bahasa Inggris yang terdiri dari kata: *trans* (merubah, memutarbalikkan) dan *value* (nilai), yang berarti suatu peristiwa memutarbalikkan nilai-nilai. Nilai-nilai yang diputarbalikkan adalah nilai-nilai terdahulu atau lama. Maksud dari memutarbalikkan ini adalah evaluasi

dan interpretasi subjek terhadap nilai-nilai lama. Nietzsche berpendapat bahwa tidak ada kebenaran objektif, yang ada hanyalah subjektifitas; tidak ada fakta, yang ada hanyalah interpretasi. Segala sesuatunya harus diinterpretasikan ulang oleh individu bila ia mengharapkan untuk terus menjaga kelangsungan hidupnya. Terjadinya transvaluasi adalah ketika seorang individu mengartikan gagasan-gagasan lama menjadi makna yang baru. Transvaluasi menggantikan nilai-nilai *altruistic* yang telah terdahulu yang lebih mengutamakan kebersamaan kepada nilai-nilai yang individualistik yang lebih mengutamakan kepentingan dan kemajuan diri sendiri.

### **(c). Teori Demokrasi Pancasila Reformasi**

Demokrasi adalah sebuah sistem politik di mana pengembangan kekuasaan pada tangan orang banyak atau masyarakat yang berasal-mula pada kesetaraan dan keadilan sosial. Demokrasi adalah *Sovereignty of People*, yang artinya kedaulatan rakyat. Dasar pemikiran modern tentang demokrasi ialah ide politis-filosofis tentang kedaulatan rakyat. Ini berarti semua kekuasaan politik dikembalikan pada rakyat itu sendiri sebagai subjek asli otoritas. Hendaknya mereka sendiri sebagai manusia yang bebas dan pada dasarnya sama, berperan serta dalam mengambil keputusan dalam masalah-masalah politik. Tradisi demokrasi hanya membicarakan tentang kesetaraan dan kesamaan, bukan tentang kebebasan. Demokrasi merupakan sistematisasi di mana solusi atas sebuah kondisi politik yang panas sudah tidak perlu lagi menjadi sebuah konfrontasi berdarah, melainkan cukup hanya dalam perdebatan wacana/*discourse*. Demokrasi bertendensi untuk memberi keleluasaan bagi siapa saja untuk melakukan apa saja yang disukainya (Abidin, 2003: 103). Demokrasi membutuhkan *homogeneity* atau keseragaman sebagai yang utama dan bila perlu menghapuskan *heterogeneity* atau keanekaragaman.

Demokrasi Pancasila Reformasi adalah suatu sistem ketatanegaraan yang berlaku di negara Republik Indonesia, di mana setiap pergerakan politiknya harus didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945. Konsep demokrasi ini telah mengalami penyempurnaan dalam proses pelaksanaan dan pemerintahannya sejak zaman

reformasi pada tahun 1998 hingga kini. Ada dua aspek yang disempurnakan dalam konsep Demokrasi Pancasila Reformasi ini, yaitu:

*Pertama*, peningkatan peran lembaga-lembaga tinggi dan tertinggi negara dengan menegaskan wewenang serta tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan. *Kedua*, tata hubungan yang jelas antara lembaga-lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif yang berlaku di Indonesia (“Demokrasi Pancasila Reformasi”).

Kelemahan sistem demokrasi yang diberlakukan di Indonesia yaitu calon presiden dari partai pemenang pemilu tidak lantas menjadi presiden. Sistem demokrasi di Indonesia tidak memberikan hak langsung kepada partai pemenang pemilu untuk membentuk pemerintahan baru. Akibatnya, terbuka kemungkinan mereka yang memegang pemerintahan baru bukanlah partai yang menang dalam pemilu.

#### **(d).Teori Budaya Liberal**

Budaya liberal adalah suatu corak kemasyarakatan yang menjunjung tinggi kebebasan hak dalam berpolitik. Hak berpolitik setiap warganegara dalam budaya liberal tidak boleh disangkut-pautkan dengan latar belakang agama, ras, jenis kelamin, dan segala hal yang bersifat primordial. Kehidupan bermasyarakat dalam budaya liberal berkecenderungan untuk menekan sekecil-kecilnya akan kemungkinan terjadinya konflik *horizontal* dalam rangka mengejar cita-cita politik setiap warganegaranya. Budaya liberal menghasilkan perilaku politik yang terbuka terhadap perbedaan pendapat (Denny J.A, 2006: 185).

#### **(e). Teori Roh-Materi/Jiwa-Badan**

Teori filsafat manusia yang digunakan di dalam skripsi ini mengambil teori tentang masalah Roh-Materi/Jiwa-Badan (*The Mind-Body Problem*) dari Louis Leahy. Manusia adalah sosok makhluk hidup yang paling unggul dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya di muka bumi. Keunggulan manusia yang tidak dimiliki oleh makhluk hidup lain adalah kepemilikan akal budi, pikiran, atau rasio. Dengan akal pikiran ini manusia dapat memenuhi segala kebutuhannya dengan tidak lagi bergantung pada kondisi alam. Manusia

diharapkan untuk dapat bertahan hidup di dalam kondisi yang *se-extreme* mungkin. Maka dari itu, dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya (yang semakin hari semakin kompleks), manusia harus bisa *survive* dalam keadaan apapun. Hal inilah yang membuat manusia harus melakukan ‘penegasan pada kehidupan’. Kebijakansejati adalah menerima kehidupan ini sepenuhnya secara spontan, tanpa membuang sesuatu-pun dan tanpa memilih-milih. Manusia harus bersikap untuk menerima kenyataan hidup secara penuh. Pada dasarnya, kesengsaraan manusia terletak pada ketakutannya terhadap kekuatan kehidupan yang menyatakan diri dalam segala hal dan ketakutan itu mengurung manusia dalam kepahitan hati (Leahy, 1994: 4-10).

**(f). Teori Sistem yang bersifat *Backward-looking***

Sistem adalah suatu susunan atau organisme besar yang memiliki fungsi tertentu demi suatu tujuan. Sistem juga berarti suatu metode atau cara untuk melakukan sesuatu. *Backward-looking* adalah istilah dalam bahasa Inggris yang berarti melihat ke belakang. Melihat ke belakang maksudnya adalah mempertahankan nilai yang sudah menjadi tradisi serta tidak menginginkan adanya pembaharuan-pembaharuan. Jadi, sistem yang bersifat *Backward-looking* mengandaikan adanya suatu tata-tertib di dalam masyarakat yang menggunakan cara-cara lama (Nietzsche, 1988: 215).

**1.6 Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- (a). Untuk mengetahui jawaban atas pertanyaan penelitian yang dilontarkan oleh penulis, yakni: mengapa cita-cita bangsa Indonesia untuk mencapai kehidupan masyarakat yang demokratis masih belum terwujud?
- (b). Untuk mengetahui secara filosofis tentang ada atau tidaknya sikap-sikap mental yang dapat memperbaiki kehidupan demokrasi di Indonesia.
- (c). Untuk mengetahui secara filosofis tentang kehidupan demokrasi di Indonesia.

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

- (a). Bagi kehidupan bermasyarakat adalah untuk memperkenalkan kepada khalayak luas akan pentingnya konsep Aristokrasi *Übermensch* dalam menghadapi tantangan zaman.
- (b). Bagi studi filsafat adalah untuk memberikan kontribusi dan perkembangan pada studi filsafat melalui kajian realitas sosial dan politik menjadi hal yang filosofis.
- (c). Bagi penulis adalah untuk memenuhi tugas akhir dari masa perkuliahan di program studi Filsafat FIB UI.

### 1.7 Sistematika Penulisan

Skripsi ini, yang berjudul “Aristokrasi *Übermensch*: Suatu Kritik Terhadap Realitas Demokrasi di Indonesia”, terbagi menjadi enam Bab, yaitu (a). Bab 1, Pendahuluan, (b). Bab 2, Konsep Aristokrasi *Übermensch* dari Nietzsche, (c). Bab 3, Realitas Kehidupan Demokrasi di Indonesia, (d). Bab 4, Analisa Aristokrasi *Übermensch* atas Kehidupan Demokrasi di Indonesia, (e). Bab 5, Penutup.

(a). Pada Bab 1, penulis menjelaskan mengenai latar belakang masalah yang akan menjadi objek penelitian, perumusan masalah, pertanyaan penelitian, metode penelitian yang akan digunakan, kerangka teori dan konsep, serta tujuan dan kegunaan penelitian.

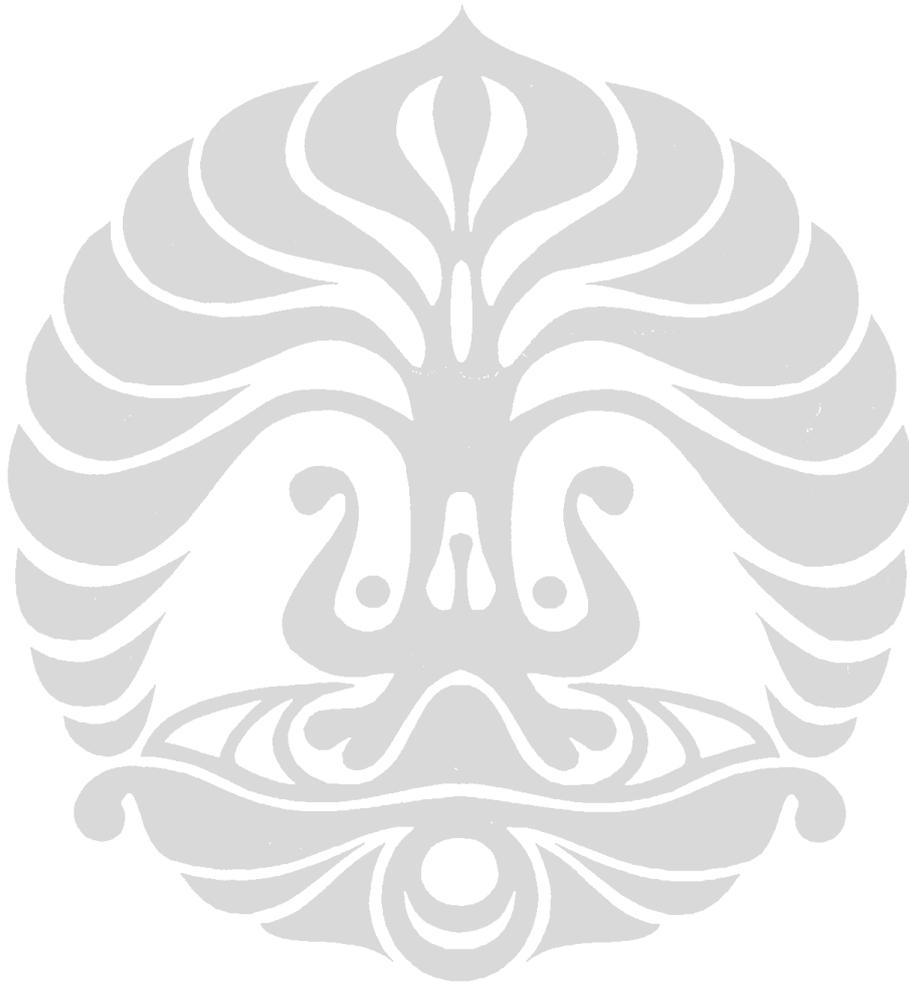
(b). Bab 2 membicarakan mengenai konsep Aristokrasi *Übermensch* sebagai suatu konsep sosial-politik terbaik yang dikuasai oleh seorang manusia yang unggul. Aristokrasi *Übermensch* adalah konsep yang akan digunakan oleh penulis sebagai alat pengkritik atas permasalahan yang diajukan.

(c). Bab 3 membicarakan mengenai fenomena-fenomena yang terjadi dalam realitas kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Pada bab ini, penulis membicarakan mengenai praktik-praktik serta masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia dalam menjalani kehidupan berdemokrasi.

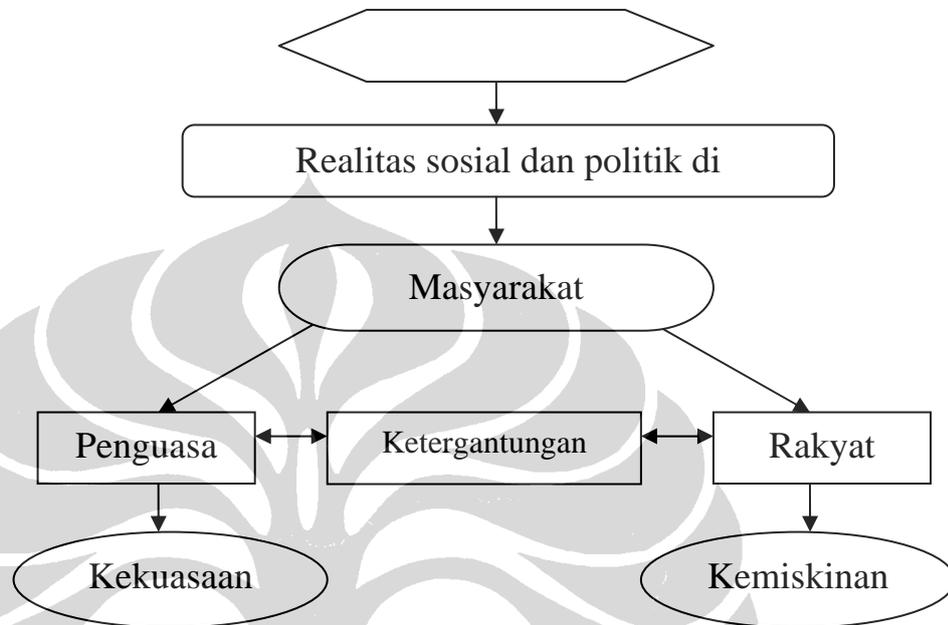
(e). Bab 4 membicarakan tentang analisa konsep Aristokrasi *Übermensch* dengan realitas kehidupan demokrasi di Indonesia. Pada bab ini penulis mengkritisi praktik serta corak kehidupan demokrasi di Indonesia yang tidak mampu untuk

memajukan masyarakatnya melalui gagasan Aristokrasi Übermensch. Penulis juga menjelaskan tentang ada atau tidaknya sikap-sikap mental yang mampu untuk memperbaiki kehidupan demokrasi di Indonesia.

(f). Bab 5 adalah penutup, yang terdiri dari kesimpulan, catatan kritis, relevansi, dan solusi dari penulis secara individu.



Berikut ini adalah bagan tentang hubungan antara teori Demokrasi dengan pengaruhnya terhadap masyarakat Indonesia:



### BAGAN 1

#### **Pengaruh Kehidupan Demokrasi terhadap Masyarakat Indonesia**

Demokrasi mempengaruhi masyarakat Indonesia yang direpresentasikan sebagai penguasa dan rakyat. Penguasa dan rakyat memiliki hubungan saling tergantung antara yang satu dengan yang lainnya. Walaupun demikian, keduanya mendapatkan hasil yang bertolak belakang dari hubungan tersebut. Penguasa mendapatkan kekuasaan sementara rakyat mendapatkan kemiskinan.